

TAJUK RENCANA

Mengoreksi Putusan Hakim

PUTUSAN perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan memulainya dari awal yang berimplikasi penundaan Pemilu 2024 masih mengundang kontroversi. Sudah banyak pakar membahas putusan kontroversial itu, mulai dari tidak menangnya PN Jakpus mengadili perkara tersebut, karena bukan kompetensinya, hingga analisis bahwa putusan itu tidak terjadi di ruang hampa.

Komisi Yudisial (KY) pun angkat bicara dan sedang menelisik ada tidaknya pelanggaran perilaku hakim. Artinya, KY tidak akan memeriksa isi putusan (material) tersebut, melainkan hanya memeriksa personal hakimnya, apakah ada pelanggaran perilaku atau tidak, tak lebih dari itu. Jika ditemukan pelanggaran perilaku, tentu akan dikaitkan dengan putusan tersebut. Hanya saja KY tidak punya kewenangan untuk mengubahnya.

Fakta hukumnya, putusan telah dijatuhkan PN Jakpus. Bahwa kemudian menimbulkan kontroversi dan ada dugaan hakim tingkat pertama ini melampaui kewenangannya, tentu untuk mengoreksinya harus melalui mekanisme hukum pula, bukan politik omeski keduanya tak dapat dipisahkan. Karena, kita mendorong KPU selaku pihak tergugat untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Inilah cara mengoreksi kekeliruan hakim, karena sifat putusan yang dijatuhkan di pengadilan tingkat pertama (PN Jakpus) belum final dan belum mengikat. Sebagai manusia biasa, hakim bisa saja keliru menerapkan hukumnya omeski banyak yang beranggapan kemungkinan itu kecil karena majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut tergolong senior atau punya jam terbang tinggi. Namun, hemat kita, kekeliruan itu tetap bisa terjadi.

Justru karena itulah hukum menyediakan mekanisme pengajuan banding, dengan maksud untuk mengoreksi kekeliruan hakim di

tingkat pertama, baik menyangkut penerapan hukumnya maupun substansi atau materi perkaranya. Soal ada apa di balik putusan kontroversial itu, kiranya menjadi ranah KY untuk memeriksa perilaku hakimnya.

Dalam asas hukum perdata, hakim tidak boleh memutus di luar yang diminta penggugat, dalam hal ini pengurus Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Mengutip pernyataan Ketua Umum Prima, Agung Jabo Priyono, pihaknya hanya ingin berpartisipasi dalam Pemilu 2024, bukan menginginkan agar Pemilu ditunda. Sementara langkah mengadukan ke Bawaslu dan PTUN juga sudah ditempuh Prima, namun hasilnya Prima tetap dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena dokumen administrasinya tidak lengkap.

Bawaslu pun telah meminta kepada KPU untuk memberi kesempatan bagi Prima untuk memperbaiki dokumen administrasi dalam waktu 1 x 24 jam, namun tetap saja hasilnya tidak memenuhi syarat. Hingga kemudian Prima mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari perspektif HAM memang tidak salah bila pengurus Prima mengajukan gugatan ke PN Jakpus.

Karena perkara sudah diajukan, maka hakim mau tak mau harus memeriksanya, karena dalam hukum dikenal asas hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, melainkan harus memeriksanya. Setelah melakukan pemeriksaan, di sinilah sebenarnya hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk menolak mengadili karena perkara yang diajukan bukan kompetensinya atau lebih dikenal dengan kompetensi absolut.

Jadi sesungguhnya, kalau hakim berkeyakinan tidak memiliki kewenangan mengadili perkara tersebut, semestinya sudah ditolak sejak awal. Apalagi, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tak memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk menanganinya. ❏d

Mencermati Mahakarya Keistimewaan

Haryadi Baskoro

(Indian Ocean Rim Association). Visi itu bahkan melampaui visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY 2005-2025 yang menargetkan DIY pada 2025 menjadi pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata terkemuka di Asia Tenggara.

Kedua, sebagai kreator mahakarya, Sultan HB X fasih mencermati momentum.



Bertindak signifikan, tepat pada waktunya. Terlihat ketika memutuskan ikut menggulirkan Gerakan Nasional Reformasi 1998. Setelah berpuasa, kala itu beliau mendapat semacam pengertian adiko-drati bahwa *iyen wis ana laron ewon-ewon ngrubung omah tawon kembar, bakal ana penggedhe ditinggal naganèi*. Maknanya, jika sudah terjadi *people power*, penguasa rezim akan lengser (Nusantara, 1999).

Ketiga, sama seperti pendahulunya, Sultan HB X inovatif, pro-perubahan, *out of the box* dan berani melawan arus. Itulah karakteristik mahakarya ayahandanya, Sultan HB IX yang pro-perubahan. Bergabung dengan RI, bukankah itu per-

ubahan? Prinsip Tahta untuk Rakyat, jelas itu mengubah substansi monarki. Spirit perubahan seperti itu menjiwai Sultan HB X. Mengubah orientasi dari ke Utara ke Selatan, dari menghadap ke Gunung Merapi menjadi menghadap ke Samudera Hindia. Bukankah itu *out of the box*?

Solutif

Keempat, Sultan HB X mendambakan mahakarya yang solutif. Hal itu dapat dilihat dari salah satu tekad dari lima tekad kepemimpinan yang ditegaskannya dalam pidato jumenengan, 7 Maret 1989. Diungkapkan, bertekad untuk tidak memiliki ambisi apapun, selain senantiasa berusaha hanya bagi kesejahteraan rakyat (Nusantara, 1999).

Kelima, mahakarya itu terwujud jika kepemimpinan Sultan kuat dan ada dukungan penuh dari birokrasi dan rakyat. *Manunggaling* raja-birokrasi-rakyat adalah kuncinya. Dulunya penjajah Belanda memunculkan unsur *Pepatih Dalem (rijksbestuurder)* yang memiliki dwikesetiaan, bermuka dua. Bahkan bisa berkonflik dengan raja. Sultan HB IX menghilangkan hambatan rendahnya komitmen birokrasi saat itu agar bisa leluasa memimpin secara *top down*. Situasi Sultan HB X sekarang tentu jauh lebih suportif. Namun kepemimpinannya masa kini perlu lebih *top down* untuk menggerakkan birokrasi guna mewujudkan mahakarya-mahakarya Keistimewaan Yogyakarta lebih cepat. ❏d

**) Dr Haryadi Baskoro, pakar Keistimewaan Yogyakarta.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Sarinah dalam Bingkai Perempuan Modern

“Perempuanlah yang mula-mula in-duhnya telur, dialah pembentuk, pembangun peradaban manusia pertama”. (Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia)

SEJAK kemerdekaan 17 Agustus 1945, perempuan menjadi tumpuan Bangsa Indonesia. Meski di masa kolonialisme dan imperialisme, pahlawan yang membela Indonesia tidak hanya lahir dari laki-laki saja. Tidak dapat dipungkiri kebenarannya jika perempuan berperan sebagai pembela tanah air. Benar sekali bahwa perempuan adalah aktor pembawa kelangsungan bangsa ini.

Jauh sebelum itu, waktu zaman Soekarno kecil, tersebutlah gadis desa sederhana yang bernama Sarinah. Sarinah adalah gadis desa yang membantu mengasuh ‘Sang Putera Fajar’ saat kecil. Mulai dari memberi makan, menemani bermain, sampai menemani tidurnya. Dia bukan asisten rumah tangga, namun sudah menjadi bagian dari anggota keluarga pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai.

“Karno, pertama engkau harus mencintai ibumu. Kemudian, kamu harus mencintai rakyat jelata. Engkau harus mencintai manusia umumnya”. Begitulah mantra yang selalu dibaca Sarinah ketika menyuapi Sukarno kecil. Sarinah-lah yang telah menanamkan ajaran cinta kasih.

Ia hanya perempuan desa. Di balik kesederhanaannya ia memberi sumbangsih yang luar biasa terhadap salah satu *the founding fathers* Indonesia. Dari perempuan bernama Sarinah, Soekarno belajar mengenal rasa cinta kasih, mencintai rakyat, rakyat kecil.

“Apa sebab kitab ini saya namakan Sarinah? Saya namakan kitab ini Sarinah sebagai tanda terima kasih saya kepada pengasuh saya ketika saya masih kanak-kanak. Pengasuh saya itu bernama Sarinah. Ia Mbok saya. Ia membantu ibu

Triningsih & NP Premierita H

saya, dan dari dia saya menerima banyak rasa cinta dan rasa kasih. Dari dia saya banyak mendapat pelajaran mencintai ‘orang kecil’. Dia sendiri pun ‘orang kecil’. Tetapi budinya selalu besar!” (Soekarno, 2014 : viii).

Berpikir Modern

Secara etimologis perempuan berasal dari kata empu yang berarti tuan, orang yang mahir/ berkuasa, ataupun kepala, hulu, atau yang paling besar. Kata perempuan juga berhubungan dengan ampu sokong, memerintah, penyangga, penyangga keselamatan, bahkan wali. Perempuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:856) yaitu orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.

Berkaca dari kisah di atas, Sarinah adalah orang zaman dulu, pengasuh Soekarno. Namun ia berfikir jauh ke depan, berpikir sangat modern. Karenanya, perempuan modern saat ini bisa belajar dari Sarinah. Bahwa nasib perempuan itu tergantung dari tangan perempuan itu sendiri. Maka, perempuan harus berperan aktif agar berguna dalam kehidupan. Sementara, nasib bangsa ini dimulai dari pemikiran rakyat kecil. Pemikiran yang tulus sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan bangsa kita.

Ada banyak hal dapat dilakukan perempuan modern sekarang. Karena perempuan memiliki peran yang besar dalam mendukung kemajuan suatu bangsa. Perempuan modern harus ikut berpartisipasi dalam segala aspek seperti bidang pendidikan, ekonomi, budaya, sosial termasuk aktivitas sehari-hari. Kreativitas, kapasitas dan ke-

dudukan perempuan moderen juga menjadi setara.

Era moderen juga menghadirkan tantangan dan peluang bagi perempuan. Sudah waktunya semua perempuan modern ikut mengambil perannya masing-masing. Kita adopsi perkembangan zaman tanpa meninggalkan kebudayaan kita. Pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas juga bagian dari tanggung jawab semua pihak.

Esok kita memeringati Hari Perempuan Internasional. Inilah momentum perempuan modern Indonesia memahami, bahwa perempuan adalah embrio pembentuk pembangunan peradaban manusia pertama. Bahwa segala sesuatu perkembangan bangsa ini dan sampai kapanpun, dimulai dari para perempuan negeri. ❏d

**) Triningsih, Pustakawan Muda UIN Raden Mas Said Surakarta*
**) NP Premierita H, Alumnus Minat Studi Manajemen Informasi dan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM*

Pojok KR

Lindungi hak pilih, pemilih pindah domisili tetap terdaftar.

-- Tak hanya terdaftar, tapi juga bisa memilih.

Menag minta penyelenggaraan haji 2023 dipersiapkan detail.

-- Yang penting ongkosnya jangan terlalu mahal.

Optimis, pemulihan ekonomi lebih kuat di DIY.

-- Daya beli masyarakat juga harus kuat.

Berabe

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPD, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPD, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustuti, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Aftiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efty Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)